# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan berdasarkan acuan dari beberapa penelitian yang sudah ada. Tentunya penelitian terdahulu memiliki ruang lingkup dan pembahasan yang sama dengan penelitian ini. Ruang lingkup tersebut diantaranya adalah penelitian membahas tentang peran digitalisasi pembayaran dan inovasi sistem pembayaran terhadap pengelolaan keuangan yang menjadi acuan saya dalam membuat penelitian ini.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

| NO | NAMA DAN TAHUN PENELITI | SUMBER | METODE PENELITIAN | HASIL PENELITIAN |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bowo, F. A. (2023) | *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif, 22(2), 134-140* | Kualitatif deskriptif (studi kasus pada UMKM Kuliner dan Kerajinan). | Digitalisasi pembayaran memperkuat strategi digital marketing UMKM, meningkatkan efisiensi transaksi dan kepercayaan konsumen |
| Penelitian ini meneliti dari aspek pemasaran digital, sedangkan penelitian saat ini akan meneliti terkait dampak digitalisasi dan inovasi sistem pembayaran terhadap pengelolaan keuangan internal pada UKM Dapur Gizi di Kota Malang. | | | | |
| 2. | Khaerudin, D., Dewi, I. N., Gandara, | Jurnal Pengabdian Masyarakat | Pendampingan dan survey lapangan berbasis | Pembayaran digital meningkatkan efisiensi transaksi |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | G. S., Juan, T., & Putri, A. (2024) | Bidang Sains dan Teknologi, 3(3), 197-203. | kualitatif pada UMKM rumahan di Tangerang. | dan akses pasar; pelaku usaha lebih adaptif terhadap tren teknologi. |
| Fokus pada penelitian ini adalah pemberdayaan dan adopsi teknologi pada industry rumahan, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada analisis mendalam pengaruh digitalisasi terhadap sistem keuangan UKM Dapur Gizi di Kota Malang. | | | | |
| 3. | Handayani, N. L. P., & Soeparan, P. F. (2022) | *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa*, 4(3), 238–250. | Studi literatur (analisis teoritis dan empiris). | Sistem pembayaran digital merevitalisasi UMKM melalui percepatan arus kas dan transparansi transaksi, namun terkendala literasi digital. |
| Penelitian terdahulu berbasis teori tanpa data lapangan; penelitian saat ini menguatkan bukti empiris melalui wawancara langsung dengan pelaku UKM Dapur Gizi untuk memahami dampak riil inovasi pembayaran. | | | | |
| 4. | Supriyanto, S., Naqiya, A. Z., Rozi, F., & Apriza, T. (2025) | *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, 6(1), 102–106. | Kualitatif deskriptif (wawancara dan observasi UMKM di Kalianda). | Implementasi QRIS meningkatkan efisiensi dan akses pasar, namun masih terkendala pemahaman awal dan infrastruktur. |
| Penelitian ini fokus pada efisiensi penggunaan QRIS**,** sedangkan penelitian saat ini memperluasnya ke inovasi sistem pembayaran dan dampaknya terhadap manajemen keuangan dan pelaporan keuangan digital UKM**.** | | | | |
| 5. | Harahap, M. A. K. (2025) | *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok* | Partisipatif dan observasional (pelatihan QRIS di Pematangsiantar). | Penerapan QRIS meningkatkan kapasitas manajerial pelaku UMKM dalam mengelola |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | *Hitei*, 5(1), 191–199. | | transaksi dan laporan keuangan. |
| Walau membahas pengelolaan transaksi, penelitian ini bersifat program pelatihan, sedangkan penelitian saat ini mengkaji praktik nyata penerapan inovasi sistem pembayaran dalam aktivitas keuangan sehari-hari UKM Dapur Gizi**.** | | | | |
| 6. | Ekaputra, P. S., Ciptosari, F., & Halim, T. (2024) | *Jurnal Akademisi Vokasi*, 3(2), 1–13 | Mixed methods (survei kuantitatif dan wawancara UMKM di Labuan Bajo). | Adopsi QRIS membuka peluang pasar dan efisiensi transaksi, namun terkendala literasi digital dan infrastruktur. |
| Penelitian ini menyoroti peluang dan tantangan adopsi QRIS di daerah wisata, sementara penelitian saat ini fokus pada hubungan antara digitalisasi pembayaran dan inovasi sistem terhadap efektivitas pengelolaan keuangan UKM Dapur Gizi di Kota Malang | | | | |
| 7. | Susanti, R. A. D., Fardahlia, D., & Indrihastuti, P. (2021) | J-MACC: Journal of Management and Accounting, 4(1), 57–71 | Kuantitatif, menggunakan kusioner, teknik pirposive sampling, analisis data dengan regresi linier berganda | Peneliti menujukan bahwa kemudahan (ease of use) dan kemanfaatan (usefulness) berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan sistem pembayaran digital OVO, GoPay, dan Dana, semakin mudah dan bermanfaat, semakin tinggi keputusan penggunaan E-Money. |
| Penelitian ini fokus pada pesikologis pengguna (kemudahan dan kemanfaatan) dan pada layanan e-money untuk individu, bukan pada UKM. Belum membahas bagaimana digitalisasi pembayaran dan inovasi sistem | | | | |

| |
|---|
| pembayaran berdampak pada pengelolaan keuangan UKM sektor makanan, sehingga penelitian ini akan mengkaji implementasi langsung pembayaran digital terhadap pengelolaan keuangan UKM Dapur Gizi Keripik Lumba-Lumba Kota Malang. |

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Digitalisasi Pembayaran

1. Konsep Dasar Digitalisasi Pembayaran

Digitalisasi pembayaran merupakan transformasi sistem pembayaran dari metode konvensional berbasis tunai menjadi sistem elektronik yang memanfaatkan teknologi digital. Sementara itu, Tommi Dahlberg et al. (2015) dalam jurnal *Electronic Commerce Research and Applications* menyatakan bahwa digitalisasi pembayaran merupakan inovasi teknologi yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa uang fisik dengan menggunakan perangkat elektronik. Menurut Gaol dalam Riska (2019), digital payment adalah sistem pembayaran yang khusus telah dikembangkan untuk menangani pembayaran barang-barang secara elektronik melalui internet. Digital payment atau pembayaran digital adalah jenis pembayaran yang menggunakan media elektronik seperti SMS banking, internet banking, mobile banking, dan dompet elektronik (e-wallet).

Perkembangan digitalisasi pembayaran tidak dapat dilepaskan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang mengubah perilaku konsumen dan strategi bisnis. Dalam konteks Indonesia, pemerintah melalui Bank Indonesia telah menginisiasi Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT)

sebagai upaya mendorong masyarakat untuk menggunakan instrumen pembayaran non-tunai dalam melakukan transaksi ekonomi sehari-hari.

2. Jenis-Jenis Digitalisasi Pembayaran

Menurut Ozturk (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "Digital Payment Systems: Market Update and Regulatory Issues", sistem pembayaran digital dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan platform dan mekanisme transaksinya. Klasifikasi ini mencakup:

1. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)

   Standar kode QR nasional yang meningkatkan berbagai sistem pembayaran digital dalam satu kode.

2. Mobile Banking

   Layanan perbankan melalui aplikasi smartphone yang memungkinkan transfer, pembayaran tagihan, dan monitoring rekening secara nyata atau real-time.

3. E-wallet (Dompet Digital)

   Aplikasi yang menyimpan informasi kartu pembayaran dan memungkinkan transaksi tanpa kartu fisik.

   Contohnya: GoPay, OVO, Dana, dan ShopeePay.

4. Internet Banking

   Layanan atau platform perbankan berbasis web yang memberikan akses penuh terhadap layanan perbankan melalui internet.

Wibowo dan Pramudana (2023) dalam jurnal “Adopsi Sistem Pembayaran Digital pada UMKM di Era Digital “menambahkan bahwa

keragaman jenis pembayaran digital memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha dalam memilih platform yang sesuai dengan karakteristik bisnis dan preferensi konsumen mereka.

3. Karakteristik Digitalisasi Pembayaran

Menurut Dahlberg et al. (2025) dalam "Journal of Electronic Commerce Research", pembayaran digital memiliki karakteristik utama yang membedahkannya dari sistem pembayaran konvensional.

1. Kecepatan

   Menyelesaikan transaksi dalam hitungan detik tanpa memerlukan proses manual yang memakan waktu.

2. Transparasi

   Setiap transaksi tercatat secara digital dan dapat dilacak dengan mudah melalui Riwayat transaki.

3. Kemudahan Akses

   Dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja selama terhubung dengan internet atau jaringan telekomunikasi.

4. Keamanan

   Transaksi dilakukan dengan keamanan yang baik karna dilengkapi dengan enkripsi dan sistem auntentikasi berlapis untuk melindungi data pengguna.

5. Efesiensi Biaya

   Dapat mengurangi biaya oprasional terkait pengelolaan uang tunai, seperti biaya transportasi, penyimpanan, dan perhitungan manual.

Hidayat dan Mulyani (2021) dalam penelitian “Transformai Digital dalam sitem Pembayaran UMKM Indonesia” yang dimuat dalam Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan menambahkan bahwa karakteristik tersebut menjadikan pembayaran digital sebagai solusi efektif untuk meningkatkan efesiensi oprasional dan daya saing UMKM.

4. Manfaat Digitalisasi Pembayaran bagi UKM

Berdasarkan penelitian Bowo (2023) dalam jurnal "Penguatan UMKM melalui Pembayaran Digital", digitalisasi pembayaran memberikan manfaat strategis bagi pelaku UKM, antara lain:

1. Peningkatan Efisiensi Transaksi

   Mengurangi waktu yang dibutuhkan pada proses pembayaran dan menghilangkan kebutuhan kembalian tunai.

2. Perluasan Jangkauan Pasar

   Memungkinakan transaksi dengan konsumen dari berbagai lokasi tanpa Batasan geografis.

3. Kemudahan Pencatatan Keuangan

   Transaksi digital tercatat otomatis sehingga memudahkan penyusunan laporan keuangan.

4. Penguatan Kepercayaan Konsumen

   Dapat memberikan kesan professional dan modern yang meningkatkan kredibilitas usaha.

5. Integrasi dengan Strategi Pemasaran Digital

   Memfasilitasi promosi online dan program loyalitas pelanggan.

Pratama dan Darma (2020) dalam penelitian "Digital Payment Adoption and Its Impact on SMEs Performance" yang dipublikasikan dalam International Journal of Economics and Business Administration menemukan bahwa UKM yang mengadopsi sistem pembayaran digital mengalami peningkatan omzet rata-rata 25-40% dalam periode 6-12 bulan pertama implementasi.

5. Tantangan dalam Implementasi Digitalisasi Pembayaran

Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi digitalisasi pembayaran juga menghadapi berbagai tantangan. Menurut Ekaputra, Ciptosari, dan Halim (2024) dalam penelitian "Adopsi Teknologi Pembayaran Digital QRIS di Kalangan UMKM", tantangan utama yang dihadapi meliputi:

1. Literasi Digital yang Rendah

   Banyak pelaku UKM, terutama generasi tua, masih kesulitan memahami dan mengoperasikan teknologi digital.

2. Biaya Implementasi

   Beberapa platform pembayaran digital mengenakan biaya admin atau komisi yang dianggap memberatkan oleh pelaku UKM skala kecil.

3. Keterbatasan Infrastruktur

   Akses internet yang tidak merata, terutama di daerah pedesaan, menghambat penggunaan sistem pembayaran digital.

4. Kekhwatiran Keamanan

Adanya kekhawatiran terkait risiko penipuan online, kebocoran data, dan keamanan transaksi digital.

Setiawan dan Wati (2022) dalam "Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital" menekankan bahwa untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendampingan intensif, pelatihan berkelanjutan, serta dukungan infrastruktur dan regulasi yang memadai dari pemerintah.

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Adopsi Digitalisasi Pembayaran

Adopsi sistem pembayaran digital oleh pelaku UKM dipengaruhi oleh berbagai faktor teknis dan psikologis. Susanti, Fardahlia, dan Indrihastuti (2021) membuktikan bahwa kemudahan dan kemanfaatan berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan sistem pembayaran digital. Semakin mudah dan bermanfaat sistem pembayaran digital dipersepsikan, semakin tinggi tingkat adopsi dan penggunaan keberlanjutan oleh pelaku usaha.

7. Kemudahan Penggunaan (Ease of Use)

Venkatesh dan Davis (2000) mendefinisikan kemudahan penggunaan sebagai tingkat dimana seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi tertentu akan bebas dari usaha. Dalam pembayaran digital, kemudahan mencakup antarmuka yang intuitif, proses transaksi sederhana, dan minimnya langkah-langkah untuk menyelesaikan pembayaran. Pelaku UKM yang mempersepsikan sistem pembayaran digital sebagai mudah digunakan cenderung lebih cepat mengadopsi teknologi tersebut dalam operasional bisnis mereka.

8. Kemanfaatan (Usefulness)

Kemanfaatan mengacu pada tingkat dimana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerja mereka (Davis, 1989). Untuk UKM, kemanfaatan sistem pembayaran digital dapat diukur dari peningkatan efisiensi transaksi, kemudahan pencatatan keuangan, dan perluasan akses pasar. Penelitian Susanti et al. (2021) menunjukkan bahwa persepsi kemanfaatan memiliki pengaruh kuat terhadap keputusan adopsi pembayaran digital.

Wijaya dan Nugroho (2023) menambahkan bahwa kedua faktor ini saling berinteraksi. Sistem yang mudah digunakan cenderung dipersepsikan lebih bermanfaat, dan sebaliknya, sistem yang bermanfaat mendorong pengguna untuk mempelajarinya meskipun awalnya terasa kompleks.

### 2.2.2 Inovasi Sistem Pembayaran

A. Pengertian Inovasi Sistem Pembayaran

Menurut Rogers (2003) dalam teori "Diffusion of Innovation", inovasi adalah sebuah ide, praktik, atau objek yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau unit adopsi lainnya. Dalam konteks sistem pembayaran, inovasi merujuk pada pengembangan dan penerapan metode pembayaran baru yang lebih efisien, aman, dan mudah digunakan dibandingkan sistem sebelumnya.

Bank Indonesia (2021) dalam "Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025" mendefinisikan inovasi sistem pembayaran sebagai upaya menciptakan ekosistem pembayaran yang modern, terintegrasi, dan inklusif

melalui pengembangan teknologi dan regulasi yang adaptif. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi digital, dan memperluas akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Supriyanto et al. (2025) dalam penelitian "Inovasi Pembayaran Digital: Implementasi QRIS sebagai Metode Pembayaran Non-Tunai" menjelaskan bahwa inovasi sistem pembayaran tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga mencakup perubahan proses bisnis, model layanan, dan perilaku pengguna dalam melakukan transaksi.

B. Bentuk-Bentuk Inovasi Sistem Pembayaran

Menurut penelitian Harahap (2025) dalam "Peningkatan Kapasitas UMKM Melalui Implementasi Sistem Pembayaran Digital (QRIS)", bentuk inovasi sistem pembayaran yang berkembang di Indonesia meliputi:

1. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)

   Qris adalah inovasi sistem pembayaran yang diinisiasi oleh Bank Indonesia untuk menyatukan berbagai macam QR Code dari berbagai penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP) menjadi satu standar QR Code nasional.

   Menurut Rahmawati dan Puspitasari (2023) dalam “Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan”, QRIS mempermudah merchant (pedagang) karena hanya perlu menampilkan satu kode QR untuk menerima pembayaran dar berbagai aplikai e-wallet dan mobile banking.

2. Contactless Payment

Teknologi pembayaran tanpa sentuh menggunakan Near Field Communication (NFC) yang memungkinkan transaksi dengan mendekatkan kartu atau smartphone ke mesin pembayaran. Widodo (2022) dalam penelitian "Contactless Payment Technology and Consumer Behavior" menemukan bahwa metode ini meningkatkan kecepatan transaksi hingga 50% dibandingkan dengan metode chip atau magnetic stripe.

3. Peer-to-Peer (P2P) Payment

Platform yang memungkinkan transfer dana langsung antar individu melalui aplikasi mobile tanpa melalui proses perbankan tradisional. Menurut Kusuma dan Ardiansyah (2023) dalam "Jurnal Teknologi Keuangan Indonesia", P2P payment telah mengubah cara masyarakat bertransaksi dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk keperluan split bill, berbagi biaya, atau pembayaran informal.

4. Buy Now Pay Later (BNPL)

Sistem pembayaran cicilan tanpa kartu kredit yang terintegrasi dengan platform e-commerce dan merchant offline. Sari dan Wijaya (2024) dalam "Journal of Digital Finance Innovation" menjelaskan bahwa BNPL memberikan fleksibilitas pembayaran bagi konsumen sekaligus meningkatkan conversion rate bagi pelaku usaha.

C. Karakteristik Inovasi Sistem Pembayaran

Rogers (2003) dalam teori Diffusion of Innovation mengidentifikasi lima larakterstik inovasi yang mempengaruhi tingkat adopsi:

1. Relative Advantage (Keuanggulan Relatif)

   Untuk mengukur inovasi dipersepsikan lebih baik dari sistem yang ada. Dalam kontek pembayaran digital, keunggulan ini terlihat dari kecepatan, kemudahan, dan efeiensi biaya.

2. Compatibility (Kesesuaian)

   Melihat tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai-nilai, pengalaman, dan kebutuhan pengguna. Handayani dan oeparan (2022) menekankan bahwa sistem pembayaran digital harus kompatibel dengan proses bisnis dan budaya organisasi UKM.

3. Complexity (Kompleksitas)

   Tingkat kesulitan dalam memahami dan menggunakan inovasi. Semakin sederhana antarmuka dan proses penggunaan, semakin tinggi tingkat adopsi.

4. Triablability (Kemampuan Diuji Coba)

   Kemudahan untuk mencoba inovasi dalam skala terbatas sebelum adopsi penuh.

5. Observability (Kemampuan Diamati)

   Sejauh mana hasil penggunaan inovasi dapat dilihat oleh orang lain. Ketika pelaku UKM melihat kesuksesan rekan mereka dalam menggunakan sistem pembayaran digital, mereka cenderung lebih tertarik untuk mengadopsinya.

Nugroho dan Fajar (2023) dalam "Jurnal Inovasi Teknologi dan Bisnis" menambahkan bahwa karakteristik ini sangat relevan dalam

memahami pola adopsi inovasi pembayaran di kalangan UKM Indonesia yang memiliki keragaman tingkat literasi digital dan kapasitas finansial.

D. Faktor Pendorong Inovasi Sistem Pembayaran

Menurut Khaerudin et al. (2024) dalam penelitian "Digitalisasi UMKM dalam Inovasi Pemasaran Produk dan Pembayaran Digital", beberapa faktor yang mendorong inovasi sistem pembayaran antara lain:

1. Perkembangan Teknologi

   Kemajuan teknologi smartphone, internet, dan cloud computing memungkinkan pengembangan sistem pembayaran yang lebih canggih dan mudah diakses.

2. Perubahan Perilaku Konsumen

   Konsumen modern, terutama generasi milenial dan Z, lebih memilih kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi.

3. Dukungan Regulasi

   Bank Indonesia melalui berbagai regulasi seperti PBI No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran memberikan landasan hukum yang jelas untuk inovasi pembayaran digital.

4. Pandemi COVID-19

   Pandemi mempercepat adopsi pembayaran digital karena kebutuhan untuk mengurangi kontak fisik dan transaksi tunai.

5. Kompetisi Pasar

Persaingan antar penyedia layanan pembayaran digital mendorong inovasi berkelanjutan untuk menawarkan fitur dan layanan yang lebih baik.

Santoso dan Rahayu (2023) dalam "International Journal of Business and Technology Management" menemukan bahwa kombinasi faktor-faktor tersebut menciptakan ekosistem yang kondusif bagi percepatan inovasi sistem pembayaran di Indonesia.

E. Dampak Inovasi Sistem Pembayaran terhadap UKM

Penelitian Supriyanto et al. (2025) mengidentifikasi beberapa dampak positif inovasi sistem pembayaran terhadap UKM:

1. Peningkatan Akses Pasar

   UKM dapat menjangkau konsumen yang lebih luas, termasuk pasar digital dan e-commerce.

2. Efisiensi Oprasional

   Mengurangi waktu dan biaya yang terkait dengan pengelolaan uang tunai.

3. Peningkatan Kredibilitas

   UKM yang menggunakan sistem pembayaran modern dipersepsikan lebih profesional dan terpercaya.

4. Kemudahan Pengelolaan Keuangan

   Data transaksi digital memudahkan penyusunan laporan keuangan dan analisis bisnis.

5. Akses Pembiayaan

Riwayat transaksi digital yang tercatat dengan baik dapat menjadi basis penilaian kredit (credit scoring) untuk mengakses pembiayaan formal.

Namun, Ekaputra et al. (2024) juga mengidentifikasi dampak negatif potensial, seperti ketergantungan pada teknologi, risiko cybersecurity, dan kesenjangan digital antara pelaku UKM yang mampu mengadopsi teknologi dengan yang tidak mampu.

### 2.2.3 Pengelolaan Keuangan UKM

A. Konsep Pengelolaan Keuangan UKM

Menurut Munawir (2019) dalam buku "Analisa Laporan Keuangan", pengelolaan keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dalam konteks UKM, pengelolaan keuangan mencakup aktivitas pencatatan transaksi, pengelolaan kas, perencanaan anggaran, serta penyusunan laporan keuangan yang membantu pengambilan keputusan bisnis.

Kasmir (2016) dalam "Analisis Laporan Keuangan" menekankan bahwa pengelolaan keuangan yang baik merupakan kunci keberhasilan dan keberlanjutan usaha, terutama bagi UKM yang memiliki keterbatasan sumber daya dan akses terhadap modal eksternal. Pengelolaan keuangan yang efektif memungkinkan pelaku UKM untuk memaksimalkan profit, mengendalikan biaya, dan merencanakan ekspansi usaha dengan lebih terukur.

Hidayat et al. (2022) dalam "Jurnal Akuntansi dan Manajemen Keuangan UKM" mendefinisikan pengelolaan keuangan UKM sebagai

proses sistematis dalam mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan usaha melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi aktivitas keuangan.

B. Komponen Pengelolaan Keuangan UKM

Menurut Riyanto (2020) dalam "Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan", komponen utama dalam pengelolaan keuangan UKM meliputi:

1. Pencatatan Transaksi Keuangan

   Merupakan aktivitas dasar dalam pengelolaan keuangan yang mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran secara sistematis. Menurut Wahyuni dan Suryani (2023) dalam "Jurnal Akuntansi UMKM Indonesia", pencatatan yang baik menjadi fondasi untuk penyusunan laporan keuangan dan pengambilan keputusan bisnis.

2. Pengelolaan Kas (Cash Management)

   Pengelolaan arus kas masuk dan keluar untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk operasional sehari-hari. Hamdani (2021) dalam penelitian "Cash Flow Management in Small Business" menekankan bahwa banyak UKM mengalami kegagalan bukan karena tidak profitable, tetapi karena buruknya pengelolaan kas.

3. Penyusunan Anggaran (Budgeting)

   Proses perencanaan keuangan untuk periode tertentu yang mencakup proyeksi pendapatan dan alokasi biaya. Sari dan Indrawati (2022) dalam "Jurnal Perencanaan Keuangan Bisnis" menemukan bahwa UKM yang

menerapkan budgeting memiliki tingkat profitabilitas 30% lebih tinggi dibandingkan yang tidak.

4. Analisis Laporan Keuangan

   Interpretasi data keuangan untuk menilai kinerja usaha dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Menurut Sugiono (2023) dalam "Financial Analysis for SMEs", analisis rasio keuangan seperti likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas sangat penting untuk evaluasi kesehatan keuangan UKM.

5. Pengendalian Biaya (Cost Control)

   Upaya untuk meminimalkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan. Pratiwi dan Sukma (2024) dalam "Jurnal Efisiensi Bisnis" menunjukkan bahwa pengendalian biaya yang efektif dapat meningkatkan margin keuntungan UKM hingga 15-20%.

C. Tantangan Pengelolaan Keuangan UKM

Handayani dan Soeparan (2022) dalam penelitiannya mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam pengelolaan keuangan UKM:

1. Keterbatasan Pengetahuan Akuntansi

   Banyak pelaku UKM tidak memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang keuangan atau akuntansi.

2. Pencatatan yang Tidak Sistematis

   Masih banyak UKM yang melakukan pencatatan keuangan secara manual dan tidak teratur.

3. Percampuran Dana Pribadi dan Usaha

Ketiadaan pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi pemilik dengan keuangan usaha.

4. Keterbatasan Akses terhadap Teknologi

   Belum semua UKM memanfaatkan software akuntansi atau sistem digital untuk pengelolaan keuangan.

5. Kurangnya Perencanaan Keuangan Jangka Panjang

   Fokus pada operasional harian tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang.

   Dewi dan Kusuma (2024) dalam "International Journal of Small Business Management" menemukan bahwa 60% kegagalan UKM disebabkan oleh pengelolaan keuangan yang buruk, bukan karena kurangnya permintaan pasar atau kualitas produk.

D. Peran Digitalisasi dalam Pengelolaan Keuangan UKM

Menurut Bowo (2023), digitalisasi pembayaran memberikan kontribusi signifikan terhadap pengelolaan keuangan UKM melalui:

1. Otomasi Pencatatan

   Transaksi digital tercatat otomatis dalam sistem, mengurangi human error dan menghemat waktu.

2. Real-Time Monitoring

   Pelaku usaha dapat memantau kondisi keuangan secara real-time melalui dashboard aplikasi.

3. Integrasi dengan Software Akuntansi

Banyak platform pembayaran digital yang dapat diintegrasikan dengan aplikasi akuntansi seperti Accurate, Jurnal, atau Zahir.

4. Kemudahan Rekonsiliasi

   Proses pencocokan antara catatan internal dengan mutasi bank menjadi lebih mudah dan cepat.

5. Analisis Data yang Lebih Baik

   Data transaksi digital dapat diolah untuk menghasilkan insight bisnis seperti pola pembelian, produk terlaris, dan tren penjualan.

Nugroho et al. (2024) dalam "Jurnal Transformasi Digital UMKM" menemukan bahwa UKM yang mengadopsi sistem pembayaran digital mengalami peningkatan akurasi pencatatan keuangan sebesar 45% dan pengurangan waktu pembuatan laporan keuangan hingga 60%.

### 2.2.4 Keterkaitan Digitalisasi Pembayaran, Inovasi Sistem Pembayaran, dan Pengelolaan Keuangan UKM

A. Hubungan Digitalisasi Pembayaran dengan Pengelolaan Keuangan

Menurut Handayani dan Soeparan (2022), digitalisasi pembayaran memiliki hubungan yang erat dengan pengelolaan keuangan UKM. Sistem pembayaran digital menyediakan data transaksi yang terstruktur dan terintegrasi, yang memudahkan proses pencatatan, monitoring, dan pelaporan keuangan. Transaksi yang tercatat secara digital dapat langsung tersinkronisasi dengan sistem akuntansi, mengurangi beban administratif dan meminimalkan kesalahan pencatatan.

Pratama dan Sugiarto (2023) dalam "Jurnal Sistem Informasi Keuangan" menjelaskan bahwa digitalisasi pembayaran menciptakan ekosistem keuangan yang lebih transparan dan terukur. Pelaku UKM dapat dengan mudah melacak setiap transaksi, mengidentifikasi pola pembelanjaan, dan membuat keputusan finansial berdasarkan data yang akurat dan real-time.

Selain itu, Rahmawati et al. (2024) dalam penelitian "Digital Payment and Financial Literacy in SMEs" menemukan bahwa adopsi pembayaran digital secara tidak langsung meningkatkan literasi keuangan pelaku UKM karena mereka terpaksa belajar menggunakan teknologi dan memahami laporan transaksi digital.

B. Hubungan Inovasi Sistem Pembayaran dengan Pengelolaan Keuangan

Supriyanto et al. (2025) menjelaskan bahwa inovasi sistem pembayaran seperti QRIS tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga mendukung pengelolaan keuangan yang lebih profesional. Dengan adanya catatan transaksi yang detail dan terorganisir, pelaku UKM dapat menyusun laporan keuangan yang lebih akurat, melakukan analisis profitabilitas per produk, dan merencanakan strategi bisnis yang lebih matang.

Harahap (2025) dalam penelitiannya menemukan bahwa implementasi QRIS meningkatkan kapasitas manajerial pelaku UKM dalam mengelola transaksi dan laporan keuangan. Pelaku UKM yang sebelumnya kesulitan membuat laporan keuangan sederhana, setelah mengadopsi QRIS menjadi lebih terbiasa dengan konsep-konsep dasar akuntansi karena data transaksi sudah tersedia dalam format yang terstruktur.

Widodo dan Sari (2024) dalam "Jurnal Inovasi Keuangan Digital" menambahkan bahwa inovasi sistem pembayaran menciptakan transparansi yang diperlukan untuk akses pembiayaan. Lembaga keuangan dapat menilai kelayakan kredit UKM berdasarkan histori transaksi digital yang tercatat dengan baik, sehingga membuka peluang bagi UKM untuk mendapatkan modal dengan persyaratan yang lebih fleksibel.

Adopsi digitalisasi pembayaran UKM sangat dipengaruhi oleh persepsi pelaku usaha terhadap sistem tersebut. Susanti et al. (2021) membuktikan bahwa kemudahan dan kemanfaatan menjadi faktor penentu keberhasilan adopsi teknologi. Pelaku usaha yang merasa sistem mudah dan bermanfaat akan lebih mudah mengintegrasikannya dalam pengelolaan keuangan, sementara persepsi negatif menjadi hambatan utama bahkan ketika infrastruktur telah tersedia. Pemahaman terhadap persepsi pelaku UKM Dapur Gizi ini penting untuk menganalisis bagaimana digitalisasi pembayaran berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan mereka.

C. Modal Integrasi Digitalisasi dan Inovasi Pembayaran dalam Pengelolaan Keuangan UKM

Berdasarkan kajian literatur, dapat dikembangkan model integrasi yang menunjukkan bagaimana digitalisasi dan inovasi pembayaran berkontribusi terhadap pengelolaan keuangan UKM:

1. Tahap Input

Digitalisasi dan inovasi pembayaran menyediakan data transaksi yang akurat, lengkap, dan real-time.

2. Tahap Proses

   Data transaksi digital diolah secara otomatis menjadi catatan keuangan yang terstruktur, mengurangi beban administratif dan risiko kesalahan manual.

3. Tahap Output

   Menghasilkan laporan keuangan yang akurat, informasi arus kas yang up-to-date, dan insight bisnis untuk pengambilan keputusan.

4. Tahap Outcome

   Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan, transparansi finansial, dan akses terhadap layanan keuangan formal.

Santoso et al. (2024) dalam "Model Transformasi Digital untuk UMKM" menegaskan bahwa model integrasi ini memerlukan dukungan infrastruktur teknologi, pelatihan SDM, dan komitmen manajemen untuk dapat berjalan efektif.

## 2.3 Kerangka Berpikir Penelitian

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan, penelitian ini menggunakan kerangka berpikir kualitatif yang menggambarkan hubungan antara digitalisasi pembayaran dan inovasi sistem pembayaran terhadap pengelolaan keuangan UKM.




**Gambar 2.1 Kerangka Penelitian**

Digitalisasi pembayaran meningkatkan efisiensi oprasional melalui percepatan transaksi, pengurangan biaya, meminimalisasi kesalahan, serta otomatisasi proses manual, hal ini memungkinkan UKM Dapur Gizi Kripik Lumba-Lumba untuk beroperasi lebih cepat dan akurat, mengurangi biaya oprasional, serta meningkatkan kepuasan pelanggan.

Digitalisasi pembayaran yang mencakup penggunaan QRIS, mobile banking, e-wallet, dan platform pembayaran digital lainnya, serta inovasi sistem pembayaran yang diterapkan oleh UKM Dapur Gizi Keripik Lumba-Lumba, dipahami sebagai fenomena yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan usaha. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali secara mendalam pengalaman, persepsi, dan praktik pelaku UKM dalam mengimplementasikan digitalisasi dan inovasi pembayaran, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada pencatatan transaksi,

pengelolaan arus kas, penyusunan laporan keuangan, dan pengambilan keputusan bisnis.

Kerangka berpikir ini sejalan dengan paradigma konstruktivis yang memandang bahwa realitas pengelolaan keuangan UKM dibentuk oleh interpretasi dan pengalaman subjektif pelaku usaha dalam konteks digitalisasi pembayaran yang terus berkembang.